



# Sejarah Pendidikan Di Indonesia Dari Masa Prasejarah Hingga Awal Kemerdekaan

Humaira Dzakiyya Azizah<sup>1\*</sup>, Bihar Hadil Alam<sup>2</sup>, Andia Nursyaban<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Pendidikan Sejarah, Universitas Pendidikan Indonesia

<sup>1\*</sup> humairadza@upi.edu

## Abstrak

Artikel ini membahas mengenai sejarah pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan pendidikan di Indonesia dari masa ke masa, dengan mengidentifikasi setiap perbedaannya berdasarkan tujuan, konten pembelajaran, sarana prasarana, hingga tingkatan pendidikan yang ada dari masa prasejarah hingga awal kemerdekaan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Terdapat beberapa pembahasan yang ada di dalam penelitian ini, mulai dari pendidikan masa prasejarah, pendidikan masa Hindu-Budha, pendidikan masa Islam, pendidikan masa kolonial, pendidikan masa jepang, dan pendidikan masa awal kemerdekaan (1945-1950).

**Kata Kunci:** Sejarah, Sejarah Pendidikan, Pendidikan Indonesia

## PENDAHULUAN

Pendidikan adalah sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta terampil di masyarakat (Rahman dkk, 2022). Secara hakikat, pendidikan merupakan adalah sebuah proses humanisme yang selanjutnya dikenal dengan istilah memanusiakan manusia (Pristiwanti dkk, 2022). Dalam pengertian yang lebih sederhana, pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi dirinya yang kemudian dikembangkan dalam proses pembelajaran di institusi pendidikan baik yang sifatnya formal, informal, maupun non formal.

Dalam perkembangannya, pendidikan telah melalui sejarah yang sangat panjang. Secara historis, pendidikan terus berkembang dari zaman ke zaman. Pendidikan yang berkembang setiap zaman memiliki ciri dan sistem yang berbeda-beda. Karakteristik pendidikan tiap zaman tentu saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada zaman tersebut. Di Indonesia sendiri, pendidikan terus berkembang dari zaman prasejarah hingga zaman modern ini. Dengan segala dinamika yang ada, pendidikan di Indonesia terus berevolusi dari masa ke masa.

Pendidikan tidak terlepas dari kebudayaan. Sejarah pendidikan adalah suatu aspek dari sejarah kebudayaan. Secara garis besar, sejarah kebudayaan Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa tahapan, diantaranya adalah masa prasejarah, masa pengaruh Hindu-Budha, masa pengaruh Islam, dan masa pengaruh Eropa (Sedyawati dkk, 1991), ditambah dengan periode masa pra-kemerdekaan hingga sistem pendidikan modern saat ini. Dalam kajian sejarah pendidikan, pendidikan berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan di setiap zamannya. Maka, sejarah pendidikan di setiap zaman memiliki ciri khasnya masing-masing.

Sebelum masa kemerdekaan, Indonesia sudah memiliki sistem pengajaran, yaitu sistem-sistem pengajaran yang berlaku di masing-masing suku bangsa atau golongan masyarakat tanpa diikat oleh suatu kebutuhan akan kesatuan nasional (Sedyawati, 1991). Dalam perkembangan pendidikan masa prasejarah, pendidikan berkembang menyesuaikan dengan pembabakan masa prasejarah di Indonesia. Sementara di masa Hindu-Budha, pendidikan berkembang menyesuaikan dengan kebudayaan dan ajaran Hindu-Budha yang dibawa masuk ke Indonesia. Ketika masuk ajaran agama Islam, pendidikan disesuaikan dengan ajaran agama Islam dan juga dengan misi penyebaran agama Islam di kalangan masyarakat. Lalu, ketika masuk masa penjajahan Belanda, pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa barat saat itu, dengan sistem pendidikan yang menyesuaikan dengan sistem pendidikan ala barat. Sama halnya dengan pendidikan ketika masa pendudukan Jepang, dimana sistem pendidikan berjalan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan Jepang saat itu. Dan akhirnya, setelah Indonesia meraih kemerdekaannya, sistem pendidikan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia. Pendidikan masa kemerdekaan berjalan dengan tujuan pendidikan nasional yang mementingkan kepentingan bangsa Indonesia.

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pendidikan di Indonesia dari masa ke masa, dengan mengidentifikasi setiap perbedaannya berdasarkan tujuan, konten pembelajaran, sarana prasarana, hingga tingkatan pendidikan yang ada di setiap masanya. Penulis menggunakan sumber kepustakaan yang ada dan merangkumnya ke dalam artikel berjudul sejarah pendidikan di indonesia dari masa prasejarah hingga awal

kemerdekaan, yang ditujukan agar pembaca dapat memahami perbedaan praktik pendidikan di Indonesia dari masa ke masa.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka atau *library research*. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan bersumber dari tulisan-tulisan sebelumnya, baik karya tulis maupun hasil penelitian (Melfianora, 2019, dalam Nurwahyuni dan Hudaidah, 2021). Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku dan artikel jurnal yang membahas mengenai sejarah pendidikan di Indonesia. Data yang dikumpulkan kemudian dibaca, dipahami, dianalisis, dan dicatat menggunakan metode analisis deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang memberikan deskripsi berupa pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh penulis mengenai topik yang sedang dibahas dari referensi yang telah dicari sebelumnya. Penulis mencari dan mengumpulkan data terkait dengan sejarah pendidikan di Indonesia dan menuliskannya dalam artikel ini yang kemudian dirangkum dalam judul Sejarah Pendidikan di Indonesia dari Masa Prasejarah Hingga Awal Kemerdekaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Pendidikan Masa Prasejarah

Masa prasejarah, atau yang lebih dikenal dengan zaman praaksara, adalah masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Masa Praaksara adalah zaman ketika manusia mencoba mengembangkan berbagai kemampuannya. Semuanya dikembangkan dari titik nol (Prasetyo, 2021). Pembabakan masa prasejarah, menurut buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid I, terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu masa berburu dan meramu tingkat sederhana, masa berburu dan meramu tingkat lanjut, masa bercocok tanam, dan masa perundagian.

Tujuan pendidikan pada zaman ini adalah agar generasi muda mampu mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, taat terhadap adat dan nilai-nilai religi (kepercayaan) yang mereka yakini (Sumiatie, 2015). Pendidikan yang dijalankan pada masa prasejarah adalah pendidikan informal. Karena pada zaman ini belum ada lembaga pendidikan formal (sekolah). Pendidikan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga dan dalam kehidupan masyarakat. Sistem pendidikan pada masa prasejarah berfokus pada pendidikan langsung yang berarti orang tua mengajarkan anak-anaknya secara langsung. Orang tua atau yang dituakan di dalam kelompok sebagai pengajar, dan anak-anak mereka sebagai yang diajar. Mereka mengajarkan materi yang kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti pengetahuan, sikap, dan nilai mengenai kepercayaan yang dianut, pendidikan untuk mencari nafkah, dan pendidikan bermasyarakat serta gotong royong (Prasetyo, 2021).

Ketika masa bercocok tanam dan perundagian, dimana manusia prasejarah mulai hidup menetap, sistem pendidikan yang dilaksanakannya juga mulai berkembang dari sebelumnya. Jika sebelumnya pendidikan berfokus pada pendidikan langsung oleh orang tua kepada anak-anaknya, pada masa ini mulai ada spesialisasi dalam pendidikan. Terutama pada masa perundagian, dimana tidak semua orang tua mampu untuk mengolah logam. Anak-anak akan belajar pada orang dewasa lainnya, terutama pandai besi. Walaupun begitu, jumlah anak-anak yang belajar pada pandai besi sangatlah terbatas, utamanya adalah anak-anak mereka sendiri.

Pada masa ini, pendidikan bersifat praktis, yaitu keterampilan yang diajarkan adalah keterampilan untuk bertahan hidup, lalu juga bersifat imitatif, yaitu meniru apa yang dilakukan orang tuanya, dan bersifat statis, yaitu terbatas pada kemampuan orang tua yang tetap (Rifa'i, 2016).

### b. Pendidikan Masa Hindu-Budha

Pendidikan masa Hindu-Budha dilaksanakan berbasis agama. Tak jauh berbeda dengan sistem pendidikan di India, dimana sistem pendidikan *gurukulawesi* juga diterapkan di Indonesia. Dalam hubungan ini, guru dan murid tinggal bersama-sama di asrama atau pertapaan. Dalam kegiatan belajar mengajar, tidak ada batasan waktunya, namun siswa juga harus membantu gurunya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, selain dari kewajiban belajar. Dalam hal ini, siswa harus patuh pada aturan yang diterapkan gurunya. Posisi guru sama halnya seperti orang tua sendiri (Sedyawati, dkk, 1991).

Sistem pendidikan masa Hindu-Budha juga tidak bisa dilepaskan dari sistem kasta yang ada. Dimana jabatan guru dipegang oleh brahmana. Selain brahmana, pendidik pada masa pendidikan Hindu-Budha ini adalah seorang buyut atau mpu yang ahli dalam suatu keterampilan. Dalam berbagai kitab, disebutkan bahwa tempat pendidikan berlangsung disebut dengan *widyagocara* atau sejenis *patapan* untuk pertapaan. Konten pelajaran yang diajarkan pun berdasarkan ilmu pengetahuan sang guru, dimana materi yang diajarkan tidak jauh dari keagamaan dan kesusastraan. Lain halnya dengan pelajaran yang diberikan oleh seorang buyut atau mpu, dimana pelajaran yang diberikan adalah sistem magang, artinya murid berdiam di tempat guru dan membantu pekerjaan guru membuat alat atau barang secara langsung. Pengetahuan diperoleh sedikit demi sedikit secara langsung sampai ia mahir (Sedyawati, 1991).

Tujuan pendidikan pada masa itu identik dengan tujuan hidup manusia, yaitu untuk mencapai moksa bagi agama Hindu, dan untuk mencapai nirwana untuk agama Budha. Secara khusus, tujuan pendidikan pada masa itu dibedakan berdasarkan kasta. Pendidikan masa Hindu-Budha di Indonesia membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Setelah Hindu Budha berkembang di Indonesia, kemampuan masyarakat

Indonesia juga menjadi berkembang karena berakulturasi dan berinteraksi dengan tradisi Hindu-Budha (Prasetyo, 2021).

### c. Pendidikan Masa Islam

Proses pendidikan Islam telah berlangsung sejak 14 abad lamanya, bertujuan untuk membina dan mendasari kehidupan anak didik dengan nilai-nilai agama sekaligus mengajarkan ilmu agama Islam sehingga mampu mengamalkan syariat agama Islam secara benar dan sesuai dengan pengetahuan agama Islam (Sedyawati dkk, 1991).

Agama Islam sendiri masuk ke Indonesia dengan berbagai macam teori, yang pasti adalah agama Islam masuk secara damai dan penyebarannya dilakukan dengan cara bottom up atau disebarakan melalui kalangan rakyat biasa hingga kalangan bangsawan istana dan penguasa. Perkembangan agama Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran pendidikan. Dimana pendidikan Islam di Indonesia dimulai dengan pelaksanaan pendidikan informal, yang menitikberatkan pada kontak pribadi antara mubaligh dan masyarakat sekitar yang akhirnya membentuk masyarakat muslim. Seiring dengan terbentuknya masyarakat muslim, pendidikan Islam semakin intensif dilaksanakan di masjid-masjid atau langgar dalam bentuk pendidikan non formal. Lalu semakin berkembangnya agama Islam di Indonesia, proses pendidikan Islam pun akhirnya dilakukan secara formal melalui pesantren, dayah, maktab, dan setelahnya muncul madrasah dan perguruan tinggi Islam (Sumiatie, 2015).

Konten pembelajaran pada masa pendidikan Islam tidak bisa dilepaskan dari pengajaran Al-Qur'an dan kitab-kitab. Pengajaran Al-Qur'an biasanya dilaksanakan di langgar atau mushola, yang berfungsi sebagai tempat pendidikan selain fungsi utamanya sebagai tempat ibadah. Pengajaran Al-Qur'an ini juga disebut sebagai Pengajian Al-Qur'an, dimana didalamnya mempelajari huruf hijaiyah dan cara membaca Al-Qur'an, cara ibadah seperti berwudhu, shalat, dan sebagainya, belajar keimanan dan juga akhlak. Selain pengajian Al-Qur'an, ada pula pengajian kitab. Dimana pengajian kitab ini diperuntukan untuk murid-murid yang sudah menyelesaikan pengajian Al-Qur'an, tempat mengajinya disebut sebagai pesantren. Sistem pendidikan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan sistem asrama di masa pendidikan Hindu-Budha, dimana terdapat hubungan dekat antara pengajar dan murid. Konten pembelajaran di pesantrennya adalah kitab-kitab karangan ulama salaf, dengan metode pembelajaran yang dikenal dengan cara bandungan (kelompok) dan sorogan (individu). Selain pengajaran kitab, di pesantren juga terdapat pengajaran bahasa Arab. Pendidikan di pesantren tidak memiliki batasan waktu, jika murid sudah menyelesaikan satu kitab, maka akan dilanjutkan untuk mempelajari kitab selanjutnya. Pola kehidupan yang unik di pesantren ini menjadi ciri khas yang sangat melekat dengan kehidupan pendidikan Islam, dan dengan ini juga pesantren mampu bertahan selama berabad-abad dengan mempergunakan nilai-nilai hidupnya (Sedyawati dkk, 1991).

### d. Pendidikan Masa Kolonial

Pendidikan dan pengajaran masa kolonial abad 16 sampai 18 tidak bisa dilepaskan dari pengaruh keagamaan. Orang-orang barat yang datang ke Indonesia, selain dengan tujuan dagang, juga menyebarkan ajaran agama Kristen. Usaha kristenisasi yang dilakukan para misionaris juga berpengaruh terhadap pendidikan di daerah-daerah yang bersangkutan. Proses pendidikan berpusat di gereja, dengan pendidikan agama sebagai unsur pokok dalam struktur pengajaran (Makmur dkk, 1993).

Pada masa pendudukan Portugis di Maluku, Portugis melalui Ordo Dominikan mampu menyebarkan ajaran Katolik Roma. Pendidikan masa Portugis secara mendasarkan dilaksanakan oleh organisasi misi Katolik Roma. Lalu pada 1536, penguasa Portugis di Maluku mendirikan sekolah seminari yang menerima anak-anak pemuka pribumi. Selain pelajaran agama, mereka juga diajarkan membaca, menulis, berhitung, dan pengajaran bahasa Latin. Pengaruh pendidikan masa Portugis sangat terasa terutama di daerah Maluku, namun penyebarannya tidak luas karena pengaruh Portugis saat itu juga terbatas di Maluku (Sumiatie, 2015).

Kekuasaan Portugis pun tergantikan dengan masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Saat itu, kekuasaan bangsa Belanda di Indonesia berada dibawah kongsi dagang VOC (*Verenigde Oost-Indische Compagnie*). Pendidikan yang berkaitan dengan sistem barat pertama kali dilaksanakan di Maluku Selatan sebagai imbas dari pengaruh Portugis. Dengan kedatangan bangsa Belanda, orang-orang Maluku saat itu meminta agar pendidikan yang sudah didirikan dan dirintis oleh Portugis dilanjutkan kembali oleh Belanda. Orang-orang Belanda akhirnya hanya meneruskan apa yang sudah berjalan di sekolah-sekolah. Namun seiring dengan perkembangannya kekuasaan dan pengaruh VOC di Indonesia, maka VOC mulai melibatkan diri dalam pendidikan karena punya kepentingan untuk meningkatkan loyalitas penduduk pribumi terhadap penguasa baru (Makmur dkk, 1993).

Proses belajar mengajar masih berlaku secara sederhana dengan penekanan pada pengajaran agama, seperti pelajaran membaca, menulis, dan bernyanyi yang dikaitkan kepada ajaran agama. Bahasa pengantar pendidikannya adalah bahasa Belanda, walaupun awalnya masih menggunakan bahasa Melayu klasik dan bahasa daerah, namun untuk menyebarkan pengaruhnya, pengajaran bahasa Belanda pun semakin ditingkatkan dan disempurnakan (Makmur dkk, 1993).

Pada abad ke-19, muncul *Europeesche Lagere School* (ELS) dimana bahasa Belanda diajarkan. Pengajaran bahasa Belanda ini diterapkan dalam proses belajar mengajar dan juga pergaulan di sekolah, walaupun murid-muridnya menggunakan bahasa sehari-hari mereka di rumah. Untuk itu, sejak 1829, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan suatu seruan untuk menyusun buku-buku pelajaran bagi keperluan pembelajaran. Pada masa ini, alat-alat penunjang pembelajaran terus dikembangkan dan diperbaharui.

Pendidikan gaya barat terus berkembang seiring dengan menguatnya kekuasaan orang Eropa di Indonesia. Pada 1818, keluar peraturan pemerintah yang membuat peraturan umum mengenai persekolahan dan sekolah rendah, yang berisi berupa ketentuan-ketentuan mengenai pengawasan, penyelenggaraan pengajaran, dan peraturan pendidikan yang sama sekali tidak menyinggung pendidikan untuk anak-anak pribumi. Dari peraturan ini, pendidikan diperuntukan untuk orang-orang Belanda saja. Tingkat pendidikannya terbagi menjadi pendidikan dasar atau *Europeesche Lagere School* (ELS) dan pendidikan menengah atau *Hogere Burger School* (HBS). Sementara pendidikan untuk anak-anak pribumi, biasanya bertempat di halaman kabupaten. Pelaksanaannya dilakukan dengan sederhana, karena urusan sekolah pribumi tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Selain di halaman kabupaten, proses pendidikan juga biasanya dilaksanakan di gubug dan umumnya ada di daerah-daerah. Bahasa yang digunakan juga bahasa Melayu atau bahasa daerah (Makmur dkk, 1993).

Selanjutnya, pemerintah mulai menaruh perhatian terhadap masalah pendidikan dan menyadari ketertinggalan yang harus dikejar. Dari situ, muncul sekolah dasar untuk bumiputera yang dibagi menjadi dua kategori: Pertama, Sekolah Dasar Kelas Satu (*De School der Eerste klasse*), yang didirikan di ibukota keresidenan, kebutuhan, kewedanaan atau yang sederajat. Orang yang bersekolah di tingkat ini adalah anak-anak golongan masyarakat atas, hal ini disebabkan tujuan sekolah ini adalah untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan, perdagangan, dan perusahaan. Kedua, Sekolah Dasar Kelas Dua (*De Scholen der Tweede Klasse*), yang didirikan di distrik-distrik sehingga disebut Sekolah Distrik. Sekolah ini dibuka guna untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat umum. Dengan kata lain, sekolah ini diperuntukkan untuk anak-anak bumiputera dengan tujuan untuk mendidik calon-calon pegawai rendah. Lalu ada Sekolah Raja (*Hoofdschool*) atau sekolah lanjutan untuk mendidik anak-anak bumiputera demi kepentingan kebutuhan pegawai administrasi pemerintahan Belanda. Setelah mereka menyelesaikan pendidikan, mereka akan menduduki jabatan pekerjaan yang layak di kantor-kantor pemerintah.

Selain sekolah-sekolah yang disebutkan, ada pula sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan pertama di Hindia Belanda diusahakan atas prakarsa pihak swasta, yaitu Sekolah Pertukangan di Batavia pada 1856. Ada pula sekolah pendidikan guru (*Hollands Inlandsche Kweekschool*) yang didirikan dengan tujuan sebagai persiapan untuk mendirikan sekolah-sekolah Bumiputera. Didirikan juga sekolah dokter untuk mengatasi masalah kesehatan di Indonesia. Sekolah ini sudah dimulai sejak abad ke-19, dengan beberapa orang bumiputera diajarkan untuk menjadi juru cacar dan dilatih oleh para penilik vaksinasi. Ini dilakukan mengingat bahwa cacar adalah penyakit yang banyak diderita oleh orang Indonesia.

Perkembangan pendidikan di Indonesia sebelum abad ke-20 tidak dapat dilepaskan dari usaha kaum liberalis di parlemen Belanda. Sementara pendidikan modern masa kolonial diinisiasi dari lahirnya Politik Etis (*Ethische Politiek*) yang digagas oleh Van Deventer sebagai kritik terhadap keadaan yang serba merosot di Indonesia dan juga sebagai “balas budi” Belanda terhadap Indonesia yang sudah memperkaya negerinya.

Pemerintah Belanda mendasarkan kebijakan pada pokok-pokok pikiran bahwa: (1) pendidikan dan pengetahuan barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan bumiputera, maka bahasa Belanda diharapkan menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah, (2) pemberian pendidikan rendah bagi golongan bumiputera disesuaikan kebutuhannya. Atas dasar tersebut, corak dan sistem pendidikan pada abad ke-20 dapat ditempuh pada dua jalur, dimana satu pihak mengharapakan terpenuhinya kebutuhan akan tenaga terdidik bermutu tinggi bagi keperluan industri dan ekonomi, dan di pihak lainnya terpenuhi tenaga menengah dan rendah yang berpendidikan.

Pada sekolah dasar setingkat ELS atau HIS menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar pendidikan. Namun di sisi lain, bahasa daerah juga digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan pada sekolah tertentu. Sekolah bumiputera (*Inlandscheschool*) Kelas Dua, dengan masa belajar 5 tahun disediakan untuk anak-anak bumiputera golongan menengah. Lalu sekolah desa (*Volksschool*) atau sekolah rakyat, yang pada hakikatnya dimaksudkan untuk menghasilkan kaum tani dan buruh yang terpelajar. Namun, sekolah desa kurang berhasil sebagai tempat pendidikan, karena dilaksanakan di desa dan perkembangannya sangat lambat. Ada pula sekolah lanjutan (*Vervolgschool*) dan sekolah peralihan (*Schakelschool*). Setelah sekolah dasar, ada pula sekolah menengah seperti *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO), *Algemene Middelbare School* (AMS) dan *Hogere Burger School* (HBS) untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Semakin banyak kaum terdidik membuat bangsa Indonesia akhirnya menyadari bahwa mereka harus keluar dari belenggu penjajahan. Maka timbul pendidikan pergerakan nasional yang dimulai dengan berdirinya Budi Utomo pada 1908. Timbulnya organisasi yang didasari perasaan yang sama menimbulkan perkembangan baru di dunia pendidikan. Motivasi yang mendasari pendidikan nasional adalah; (1) motivasi nasional, yang dimana sistem pendidikan yang hanya diperuntukkan untuk kaum-kaum tertentu menimbulkan ketidakpuasan sehingga berusaha untuk menciptakan sistem pendidikan nasional yang sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia, (2) sistem pendidikan kolonial yang intelektualis dan individualis kurang memperhatikan keterampilan dan kepentingan hidup bersama, apalagi yang dibutuhkan bagi sebagian besar rakyat Indonesia adalah pendidikan untuk anak buruh dan petani yang nantinya dapat mengabdikan untuk kepentingan masyarakat, (3) adanya diskriminasi pendidikan yang membedakan sekolah anak-anak Belanda dan sekolah pribumi, serta (4) perlawanan secara politik kurang berhasil sehingga menginisiasi perlawanan lewat pendidikan.

Para pemimpin pergerakan nasional menyadari bahwa penyelenggaraan pendidikan bersifat nasional harus dimasukkan dalam agenda pergerakan, karena itu kemudian lahir sekolah-sekolah partikelir atas usaha perintis-perintis kemerdekaan. Awalnya sekolah tersebut memiliki dua corak, yaitu berhaluan politik dan sesuai dengan tuntutan agama (Islam). Termasuk golongan satu adalah Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, dan golongan dua adalah sekolah-sekolah Sarekat Islam, sekolah-sekolah Muhammadiyah, sekolah-sekolah Nahdlatul Ulama, Sumatera Tawalib, dan sekolah-sekolah Persatuan Ummat Islam.

#### e. Pendidikan Masa Jepang

Masa penjajahan Belanda di Indonesia berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Kalijati di Subang, Jawa Barat pada 18 Maret 1942 dan masuklah masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pada masa ini, tak ada satu sekolah pun yang diperkenankan dibuka kembali. Juga, mengingat persiapan ke arah pendidikan belum diadakan karena pada masa pemerintahan Belanda pun tidak mempersiapkan secara khusus guru-guru untuk mengajar di sekolah menengah. Kesulitan lainnya yang dihadapi adalah buku teks pelajaran seluruhnya berbahasa Belanda, sementara Jepang secara tegas melarang pemakaiannya. Akan tetapi, hal tersebut mendorong bangsa Indonesia untuk melengkapi bahasanya dengan istilah baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Di samping itu, pemerintah Jepang juga mendorong bangsa Indonesia untuk mempelajari bahasa Jepang. Pemerintah pendudukan Jepang pun membuka sekolah-sekolah yang khusus memberi pelajaran bahasa Jepang secara kilat yang disebut *Nippongo Gakko*. Selain itu, ada pula *Hakko Ichiu* yang mengajak bangsa Indonesia bekerjasama dengan Jepang dalam rangka pencapaian “Kemakmuran Bangsa Asia Timur Raya”.

Pendidikan masa Jepang tidak dapat dilepaskan dari pendidikan masa Belanda. Pendidikan pada masa Belanda serta kaitannya dengan tingkatan pendidikan seperti sekolah dasar dan sekolah menengah. Tingkatan ini dihilangkan pada masa pendudukan Jepang. Dasar pendidikan masa Jepang pun menjadi pengabdian kepada pemerintah pendudukan Jepang. Suasana pendidikan diwarnai dengan situasi perang saat itu, dimana banyak nyanyian dan semboyan serta latihan yang dihubungkan dengan persiapan menghadapi perang. Maka dari itu, penyelenggaraan pendidikan menjadi kurang efektif. Jumlah sekolah menurun, sehingga tingkat buta huruf meningkat.

Sisi baiknya, dalam pelaksanaan pendidikan, karena segala hal yang berhubungan dengan Belanda menjadi hal yang dilarang, maka bahasa pengantar pendidikan pada masa Jepang menjadi bahasa Indonesia. Demikian mata pelajaran bahasa Jepang jadi mata pelajaran wajib di semua sekolah. Buku-buku berbahasa Belanda diganti dengan buku terjemahan yang dikeluarkan oleh Kantor Pengajaran (*Bunkyo Kyoku*). Bahasa Indonesia menjadi sangat penting pada pendidikan di masa pendudukan Jepang.

Jenis-jenis sekolah pada masa Jepang secara garis besar tidak jauh berbeda dengan jenis sekolah masa Belanda. Dimana ada Sekolah Rakyat dengan masa pendidikan 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama (*Shoto Chu Gakko*), Sekolah Menengah Tinggi, Sekolah Kejuruan, Sekolah Guru yang dibagi menjadi Sekolah Guru 2 tahun (*Syoto Sihan Gakko*), Sekolah Guru 4 tahun (*Guto Suhan Gakko*) dan Sekolah Guru 6 tahun (*Koto Sihan Gakko*), serta Perguruan Tinggi seperti Sekolah Kedokteran Tinggi (*Ika Dai Gakko*), Sekolah Ahli Obat (*Yaku Gakko*), Sekolah Kedokteran Gigi (*Shika Gakko*), Sekolah Tinggi Teknik (*Kagyo Dai Gakko*), Sekolah Tinggi Kedokteran Hewan, dan Akademi Pemerintahan (*Kenkoku Gakko In*) (Makmur dkk, 1993).

#### f. Pendidikan Masa Kemerdekaan (1945-1950)

Revolusi kemerdekaan Indonesia mengakibatkan pendidikan mengalami keadaan yang cukup parah, karena sarana prasarana yang termasuk gedung sekolah, alat pelajaran, dan guru sekolah keadaannya sangat menyedihkan. Gedung-gedung sekolah banyak dialihfungsikan untuk kantor umum atau diduduki tentara, sementara alat pelajaran pun banyak yang hilang dan rusak serta guru-guru banyak yang meninggalkan lapangan kerja untuk menjadi tentara (Sjamsuddin, 1993).

Walaupun situasinya sulit saat itu, semangat untuk memperjuangkan pendidikan di tengah situasi peperangan masih membara. Menjelang detik-detik proklamasi, Ki Hajar Dewantara melalui “Sub Panitia Pendidikan dan Pengajaran” yang diketuainya merumuskan rencana pengajaran bagi Indonesia Merdeka yang saat itu masih dipersiapkan. Rencana tersebut meliputi: (1) Undang-undang kewajiban belajar, (2) pendidikan dan pengajaran nasional bersendikan agama dan kebudayaan bangsa, (3) perkembangan kebudayaan bangsa, (4) pendirian sekolah-sekolah swasta yang dibiayai oleh pemerintah, (5) susunan pelajaran pengetahuan dan kepandaian umum sesuai dengan rencana pelajaran, (6) susunan/sistem persekolahan, (7) ketentuan pelajaran bahasa dan kebudayaan, (8) ketentuan tentang pendidikan rakyat, (9) pendirian “Balai Bahasa Indonesia”, dan (10) pengiriman pelajar-pelajar ke seluruh dunia. Dalam segi perencanaan, hal yang dirumuskan Sub Panitia Pendidikan dan Pengajaran memang sudah ideal, namun melihat situasi saat itu yang masih belum stabil, hanya sebagian rencana yang dapat dijalankan.

Pada masa antara tahun 1945-1950, bangsa Indonesia mengalami banyak kesulitan dalam berbagai aspek, termasuk aspek pendidikan. Tetapi usaha untuk membangun sistem pendidikan setelah masa kemerdekaan terus dilaksanakan meskipun banyak mengalami kendala. Situasi politik yang kacau, perpindahan pusat pemerintahan dan departemen-departemennya, dan pergantian menteri secara singkat menjadi problematika yang harus dihadapi dalam usaha membangun sistem pendidikan. Meskipun demikian, proses pendidikan masih mampu berjalan walaupun terkadang situasi yang sulit akhirnya memaksa guru dan siswa meninggalkan sekolah untuk kebutuhan perang.

Adapun susunan persekolahan dan juga kurikulum yang berlaku sejak tahun 1945-1950 adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendidikan Rendah

Pendidikan Rendah adalah sekolah dasar yang sejak awal kemerdekaan disebut juga Sekolah Rakyat. Masa pendidikannya selama enam tahun, dengan tujuan pendidikan adalah meningkatkan taraf pendidikan pada zaman pra kemerdekaan serta menampung orang-orang yang berkeinginan untuk sekolah. Kurikulum pendidikan sekolah rakyat lebih menekankan pada pelajaran bahasa dan berhitung.

#### 2. Pendidikan Guru

Pendidikan guru masa 1945-1950 dibagi menjadi tiga jenis, yaitu Sekolah Guru A, Sekolah Guru B, dan Sekolah Guru C. Sekolah Guru B menempuh pendidikan empat tahun dan dimaksudkan untuk menjadi guru di Sekolah Rakyat. Murid SGB adalah murid lulusan Sekolah Rakyat yang lulus ujian sekolah lanjutan. Sekolah Guru C adalah sekolah guru dua tahun untuk mempersingkat pendidikan guru, mengingat kebutuhan guru yang mendesak. Namun akhirnya SGC ditutup karena dianggap kurang efektif, sebagian dileburkan menjadi SGB. Sekolah Guru A adalah pendidikan guru setelah SGB, biasanya diberikan tiga tahun pendidikan sesudah SMP. Mata pelajaran yang diajarkan mirip dengan SGB, namun dengan penyelenggaraan yang lebih luas dan mendalam.

#### 3. Pendidikan Umum

Ada dua jenis pendidikan umum, yaitu Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Tinggi. Sekolah Menengah Pertama tidak jauh berbeda dengan SMP pada zaman Jepang, pelajaran yang diberikan berupa Ilmu Alam dan Ilmu Pasti, serta pelajaran bahasa dan Praktik Administrasi. Sementara Sekolah Menengah Tinggi adalah jenjang pendidikan tiga tahun setelah SMP dan setelah lulus dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Pelajaran yang diterapkan masih belum jelas, namun disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masa itu. Di SMT juga ada ujian akhir dan ujian negara, walaupun bobot ujiannya masih sangat minim, karena pelaksanaannya pun bersifat darurat.

#### 4. Pendidikan Kejuruan

Pendidikan Kejuruan disini meliputi Pendidikan Ekonomi dan Pendidikan Kewanitaan. Pendidikan Ekonomi dilaksanakan tiga tahun setelah sekolah rakyat dengan nama Sekolah Dagang. Sekolah Dagang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi atau pembukuan. Sementara Sekolah Kewanitaan dilaksanakan sesudah kemerdekaan melalui Sekolah Kepandaian Puteri (SKP), dan pada 1947 dibuka Sekolah Guru Kepandaian Puteri.

#### 5. Pendidikan Teknik

Pelaksanaan Pendidikan Teknik tidak terlalu efektif, karena terkadang pelajarnya terlibat dalam pertahanan negara atau sekolahnya dijadikan pabrik senjata. Namun sekolah teknik tetap berdiri pada masa itu, seperti Kursus Kerajinan Negeri (KKN), Sekolah Teknik Pertama (STP), Sekolah Teknik (ST), Sekolah Teknik Menengah (STM), dan Pendidikan Guru untuk Sekolah Teknik (PGST).

#### 6. Pendidikan Tinggi

Perkembangan pendidikan tinggi sesudah proklamasi banyak mengalami kendala, namun tidak dapat dipisahkan dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan merupakan salah satu kekuatan rakyat Indonesia. Namun dinamika revolusi nasional membuat perguruan tinggi menjadi terpecah menjadi dua setelah Agresi Militer 1 (1947) menjadi Pendidikan Tinggi Republik dan Pendidikan Tinggi Daerah Pendudukan Belanda.

Pemerintah tidak henti-hentinya berupaya memperbaiki pendidikan dan mencari bentuk yang paling cocok bagi alam pikiran bangsa. Adapun usaha-usaha yang dilakukan pada periode 1945-1950 ditujukan pada kebutuhan utama berkenaan dengan bangunan sekolah, guru, kurikulum, dan sistem kerja serta biaya.

Dalam upaya memperbaiki kebutuhan akan bangunan sekolah, tindakan yang dilakukan adalah mengatasi bangunan rusak atau hancur akibat revolusi fisik ataupun bangunan yang masih digunakan instansi militer. Selain usaha dari pemerintah, masyarakat juga berusaha bersama untuk membangun bangunan sekolah dengan peralatannya yang kemudian disumbangkan kepada pemerintah.

Jenis dan tujuan pendidikan sebelum masa kemerdekaan umumnya bersifat verbalis, maka diperlukan usaha untuk mengubah pendidikan agar pengajaran bersifat praktis. Hal ini sejalan dengan usaha pembentukan Panitia Penyelidik Pengajaran pada April 1947. Badan ini bermusyawarah untuk mencari jalan dan mengubah sistem pendidikan kolonial ke sistem pendidikan nasional. Kurikulum yang sebelumnya dibuat demi memenuhi kepentingan pemerintah kolonial, diubah menjadi sesuai dengan kebutuhan Negara Indonesia yang merdeka. Salah satu rumusan panitia tersebut mengenai kurikulum adalah bahwa setiap rencana pembelajaran pada setiap pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut: (1) pendidikan pikiran harus dikurangi, (2) isi pelajaran harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, (3) memberikan perhatian terhadap kesenian, (4) pendidikan watak, (5) pendidikan jasmani, dan (6) kewarganegaraan dan masyarakat (Depdikbud, 1979 dalam Sjamsuddin dkk, 1993).

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan di Indonesia terbagi menjadi beberapa tahapan yang berbeda di setiap masanya. Mulai dari masa prasejarah yang memiliki tujuan untuk bertahan hidup, pendidikan masa Hindu-Budha yang kental dengan keagamaan dan kebudayaan khas Hindu-Budha, masa Islam yang tidak bisa dilepaskan dari khasnya pesantren, atau pendidikan Islam di langgar, mushola, dan sebagainya, pendidikan masa kolonial yang kental dengan ciri khas kebaratan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bangsa barat, serta pendidikan masa Jepang yang juga erat dengan kepentingan penjajah, dan juga pendidikan masa awal kemerdekaan yang penuh dinamika dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia akan pendidikan. Pendidikan di Indonesia setiap masanya memiliki ciri khas perbedaan sendiri, mulai dari karakteristik, tujuan, konten pembelajaran, sarana prasarana, dan sistemnya secara keseluruhan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini. Berbagai tahapan yang dilalui dalam proses penelitian ini mulai dari pengumpulan dan pengolahan data serta penulisan artikel melalui berbagai hambatan. Namun pelaksanaan dan penyusunan penelitian ini, kami menerima banyak bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak.

Semoga segala bentuk bantuan yang diberikan kepada kami mendapatkan ganjaran serta balasan kebaikan dari Allah SWT. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan artikel ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran untuk pengembangan penulisan kami di masa depan. Kami harap artikel ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dangu, A. S., Sumarjiana, I. K. L., & Anto, R. (2022). Sejarah Pendidikan Indonesia Awal Kemerdekaan Tahun 1945-1950. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(2), 4717-4722.
- Makmur, D., Suryo Haryono, P., & Musa, S. (1993). Sejarah pendidikan di Indonesia zaman penjajahan. Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Muharani, A., & Hudaidah, H. (2021). Dampak Masuknya Hindu Budha Terhadap Pendidikan di Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 928-934.
- Nurwahyuni, K., & Hudaidah, H. (2021). Sejarah Sistem Pendidikan di Indonesia dari Masa ke Masa. *Berkala Ilmiah Pendidikan*, 1(2), 53-59.
- Prasetyo, O. (2021). Pendidikan Indonesia pada Masa Prasejarah dan Hindu-Budha. *SEUNEUBOK LADA: Jurnal ilmu-ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan*, 8(02), 177-184.
- Pristiwanti, D., Badariah, B., Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2022). Pengertian pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 7911-7915.
- Rifa'i, M. (2016). Sejarah Pendidikan Nasional: Dari Masa Klasik Hingga Modern. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rohman, A., Sabhayati, A. M., & Andi, F. (2022). Pengertian pendidikan, ilmu pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(22), 2775-4855.
- Sedyawati, E., Zainuddin, M., & Wuryantoro, E. (1991). Sejarah pendidikan di Indonesia sebelum kedatangan bangsa bangsa barat.
- Sjamsuddin, H., Sastradinata, K., & Hasan, S. H. (1993). Sejarah pendidikan di Indonesia zaman kemerdekaan (1945-1966). Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sumiatie. 2015. Sejarah Pendidikan Indonesia. Palangka Raya: Universitas PGRI Palangka Raya.
- Wibowo, B.A. Pranowo, T.A. Febrianto, A. 2023. Sejarah Pendidikan. Yogyakarta: UPY Press.